



BUKU PANDUAN PERPAJAKAN BENDAHARA PEMERINTAH (*Edisi Revisi*)

Tim Penulis:

Mustakim Muchlis

Suhartono

Syarif Syahrir Malle

Editor:

Purwanto

Desain Layout:

Ahmad Zainuddin

Cetakan I : Desember 2014

Cetakan II : Februari 2015

Cetakan III : Januari 2016

Buku ini dipakai untuk kalangan sendiri

Hak Cipta:

Satuan Pemeriksa Internal (SPI)

UIN Alauddin Makassar

Tahun 2016

Alamat

Rektorat Lt. 2 UIN Alauddin Mks

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36

Samata, Kab. Gowa

Email: spi.uinam@gmail.com

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan **Buku Panduan Perpajakan Bendahara Pemerintah**. Buku ini hadir atas temuan-temuan tim SPI dalam melakukan pemeriksaan yang menemukan beberapa kekeliruan dalam pemotongan, pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan kewajiban perpajakan oleh bendahara dan pengelola keuangan di UIN Alauddin Makassar.

Buku ini disusun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan terbaru sehingga dapat digunakan sebagai referensi utama bagi para bendahara pemerintah, auditor BPK/BPKP/Inspektorat/SPI dan pelaku usaha serta bagi wajib pajak.

Buku Panduan Perpajakan Bendahara Pemerintah edisi tahun 2016 ini merupakan penyempurnaan/revisi dari buku panduan edisi tahun 2014. Secara keseluruhan buku ini terdiri dari 10 bab mencakup tentang: Pengertian Bendaharawan dan Ruang Lingkup Kewajiban Perpajakan, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, PPN, Faktur Pajak, Ketentuan Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan Bea Meterai serta dilengkapi bab khusus terkait Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh dan Peraturan terbaru terkait perpajakan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak atas segala masukan yang bermanfaat dan kerjasama yang baik dalam penyusunan hingga penerbitan buku ini.

Kami menyadari buku ini masih belum sempurna, oleh karena itu diharapkan hadirnya saran yang membangun demi kesempurnaan buku ini. Semoga kehadiran buku ini tercatat sebagai amal ibadah. Amiin.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, 15 Januari 2016

Tim Penulis

Daftar Isi

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I Bendahara dan Kewajiban Pajaknya	
Definisi Bendahara	1
Kewajiban ber-NPWP	2
Kewajiban Pemotongan dan Pemungutan Pajak	2
Kewajiban Penyetoran	4
Kewajiban Pelaporan	5
Subjek Pajak Penghasilan	7
Subjek Pajak Dalam Negeri	8
Subjek Pajak Luar Negeri	9
Tidak Termasuk Subjek Pajak	10
Objek Pajak Penghasilan	11
Penghasilan yang Dikenai PPh Final	13
Dikecualikan dari Objek Pajak	14
BAB II Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 26	
Pengertian PPh Pasal 21	17
Peraturan Terkait PPh Pasal 21/26.....	17
Pemotong Pajak PPh Pasal 21	18
Wajib Pajak PPh Pasal 21	18
Objek Pajak PPh Pasal 21	20
Tarif PPh Pasal 21	21
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	21
Sanksi	21
Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas.....	22
Penghitungan PPh Pasal 21 Bagi Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Bukan Pegawai	23
Pengertian PPh Pasal 26	25

Tarif PPh Pasal 26	25
Peraturan Khusus Pajak Hadiah dan Penghargaan	26
Peraturan PPh Pasal 26 Bagi Orang Pribadi yang Berstatus Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri	26
<i>Contoh Kasus 1 (Belanja Gaji)</i>	27
<i>Contoh Kasus 2 (Belanja Honorarium)</i>	29
<i>Lampiran SSP Contoh Kasus 1</i>	31
<i>Lampiran SSP Contoh Kasus 2</i>	32
<i>Contoh Kasus 3 (Penghasilan yang Diterima oleh Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan</i>	
<i>Contoh Kasus 4 (Narasumber Luar Negeri)</i>	44
<i>Contoh Kasus 5 (Tidak Memiliki NPWP)</i>	45
Jenis Kesalahan dalam Pengisian SSP PPh Pasal 21	47
Kesalahan dalam Penghitungan, Pembayaran, Pelaporan Atas Kewajiban Pajak	49

BAB III Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pengertian	50
Peraturan Terkait	50
Pemungut PPh Pasal 22	50
Objek Pemungutan PPh Pasal 22	52
Tarif PPh Pasal 22	52
Pengecualian Pemungutan PPh Pasal 22	52
Cara Menghitung PPh Pasal 22	53
Poin-poin Pertimbangan dalam PPh Pasal 22	54
<i>Contoh Kasus 1 (Belanja ATK)</i>	55
<i>Contoh Kasus 2 (Pembelian Printer)</i>	58
<i>Contoh Kasus 3 (Pembelian Komputer)</i>	60
<i>Lampiran SSP Contoh Kasus 1</i>	62
<i>Lampiran SSP Contoh Kasus 2</i>	65
<i>Lampiran SSP Contoh Kasus 3</i>	68
<i>Contoh Kasus 4 (Penerbitan Jurnal)</i>	75
<i>Contoh Kasus 5 (Pembelian Bahan Obat-obatan)</i>	77
Jenis Kesalahan dalam Pengisian SSP PPh Pasal 22	79

BAB IV Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23	
Pengertian	81
Peraturan Terkait	81
Pemotong dan Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23	81
Tarif dan Objek PPh Pasal 23	82
Bukti Pemotong PPh Pasal 23	85
<i>Contoh Kasus 1 (Jasa Katering)</i>	86
<i>Contoh Kasus 2 (Jasa Pencetakan Brosur)</i>	88
<i>Lampiran SSP Contoh Kasus 1</i>	90
<i>Lampiran SSP Contoh Kasus 2</i>	94
<i>Contoh Kasus 3 (Sewa Kendaraan/Rental Mobil)</i>	102
<i>Contoh Kasus 4 (Sewa Transportasi Laut/Perahu)</i>	103
<i>Contoh Kasus 5 (Sewa Ruang Pertemuan di Hotel)</i>	105
Jenis Kesalahan dalam Pengisian SSP PPh Pasal 23	107
BAB V Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2)	
Pengertian	109
Peraturan Terkait	109
Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	110
Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	110
PPh Final Atas Jasa Konstruksi	111
Tarif PPh Pasal 4 ayat (2) untuk Jasa Konstruksi	112
<i>Contoh Kasus 1 (Sewa Gedung)</i>	113
<i>Contoh Kasus 2 (Jasa Konstruksi)</i>	115
<i>Lampiran SSP Contoh Kasus 1</i>	118
<i>Lampiran SSP Contoh Kasus 2</i>	126
Jenis Kesalahan dalam Pengisian SSP PPh Pasal 4 ayat (2)...	137
BAB VI Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	
Pengertian	139
Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	139
Peraturan Terkait	140
Transaksi yang Dipungut PPN	141

Transaksi yang Tidak Dipungut PPN	141
Tarif Pajak	143
Istilah-istilah Penting Terkait PPN	144
Solusi Bila Kesalahan Pemungutan PPN	147

BAB VII Faktur Pajak

Peraturan Terkait	149
Istilah-istilah Penting	149
Pembuatan Faktur Pajak	150
Tata Cara Pengisian Keterangan pada Faktur Pajak	152
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak	155
Tata Cara Penggunaan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak.	157
Contoh Pengisian Nomor Faktur Pajak yang Benar	162
Karakteristik Faktur Pajak yang Benar dan Valid	163
Kesalahan-kesalahan Terkait Pengisian Faktur Pajak di UIN Alauddin Makassar	163
Ketentuan Terkait Pengusahan Kena Pajak (PKP)	163

BAB VIII Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh

Pengertian	165
Peraturan Terkait	165
Jenis-jenis SKB Dari Pemotongan PPh	165
Pembebasan Pajak Penghasilan (PPh 22, 23)	166
Syarat Permohonan SKB	166
Lampiran Contoh SKB	168
Penutup	174

BAB IX Bea Meterai

Pengertian	175
Peraturan Terkait	175
Istilah-istilah Penting	175
Objek dan Tarif Bea Meterai	177
Tidak Dikenakan Bea Meterai	177

Tata Cara Pelunasan Bea Meterai	178
Cara Penulisan Bea Meterai	179
Contoh Kesalahan Pembubuhan Meterai pada Kuitansi	183
Ketentuan Khusus dan Sanksi	184
BAB X Kumpulan Daftar Peraturan Terkait	186